

# Pembentukan Identitas Etnik di Arena Ekonomi Politik Lokal

## *Ethnic Identity Formation in Local Political Economic Arena*

Sofyan Sjaf<sup>\*)</sup>, Lala M. Kolopaking, Nurmala K. Pandjaitan, Didin S. Damanhuri

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

<sup>\*)</sup> Email : [sofyansjaf@yahoo.com](mailto:sofyansjaf@yahoo.com)

Diterima 10 Mei 2012 / Disetujui 11 September 2012

### ABSTRACT

*The formation of ethnic identity in the arena of local political economy is important to be studied in order to understand the reality of pluralism in Indonesia. The objective of this paper is to study the formation of ethnic identity in the arena of local political economy. The study uses qualitative methodology of non-positivistic paradigm with structuralism-constructivism perspective. The unit of analysis of this study is actor who is located in Kendari, Southeast Sulawesi. Data were obtained through in-depth interviews, structured interviews and Focus Group Discussion (FGD) of actors of ethnic backgrounds (Tolaki, Muna, Buton, and Bugis) and various professions (politicians, bureaucracy, academia, and NGO activists). The result shows that the formation of ethnic identity in the arena of local political economy is determined from the history of ethnic groups (position) and the experience of the actor (disposition). Both of these, form continuum lines that met in an interaction space (the interest) called the structure of ethnic identity formation. This structure is divided into two formations: (1) large-scale ethnic identity formation, and (2) limited ethnic identity formation. Both of the structures are determinants of the actors' practices in the arena of political economy. Double hierarchy principles (the principle of hierarchy of heteronomous and autonomous hierarchy) contributes to the formation of ethnic identity, which cause ethnic mobilization [identity], positive or negative.*

**Key words:** *structure of ethnic identity formation, identity politics, local political economy.*

### ABSTRAK

Pembentukan identitas etnik di arena ekonomi politik lokal penting untuk dikaji dalam rangka memahami pluralisme di Indonesia. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mempelajari pembentukan identitas etnik di arena ekonomi politik lokal. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan paradigma non-positivistik perspektif struktural-konstruktivisme. Unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Kendari, Sulawesi Tenggara. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, wawancara terstruktur dan *Focus Grup Discussion* (FGD) yang dilakukan aktor dari latar belakang berbagai etnis (Tolaki, Muna, Buton, dan Bugis) dan berbagai profesi (politisi, birokrasi, akademisi, and aktivis LSM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan identitas etnik di arena politik lokal dipengaruhi oleh sejarah kelompok etnis (posisi) dan pengalaman aktor (disposisi). Dari keduanya, bentuk garis yang berkelanjutan membentuk suatu interaksi (kesenangan) yang dinamakan pembentukan identitas etnik. Struktur ini mengacu pada dua bentuk: (1) bentuk identitas etnik dengan skala besar dan (2) pembentukan batas identitas etnik. Kedua struktur tersebut merupakan penentu arena ekonomi politik lokal. Prinsip hirarki ganda (prinsip hirarki heteronomus dan autonomus) memberikan kontribusi pada pembentukan identitas etnik yang disebabkan oleh mobilisasi [identitas], positif atau negatif.

**Kata Kunci:** struktur pembentukan identitas etnis, politik identitas, ekonomi politik lokal.

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun dengan semangat nasionalisme berdasarkan struktur masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam etnik (polietnik) dan keyakinan/agama (polireligius). Meski demikian, realitas obyektif ini menjadi ancaman tersendiri bagi bangsa

Indonesia<sup>1</sup>. Pelaksanaan pembukaan UUD 1945 yang bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan

<sup>1</sup> Ancaman ini disampaikan oleh Furnivall bahwa "...nasionalisme akan berakhir dengan mempertentangkan satu komunitas etnis melawan komunitas etnis lainnya, dan demikian semakin memperparah, bukannya meredakan, keterpecah-belah masyarakat. Kecuali suatu formula bagi

seluruh tumpah darah Indonesia, dirasa belum mampu menahan ledakan kekerasan komunal yang berlangsung sejak akhir tahun 50-an hingga tahun awal tahun 2000-an<sup>2</sup>. Sebagian besar sosiolog dan antropolog berpendapat bahwa kekerasan komunal tersebut (khususnya pasca Orde Baru), akibat dari tekanan rezim yang tidak memberikan “ruang ekspresi” bagi identitas masyarakat majemuk di Indonesia. Politik identitas seakan “bangkit” menjadi isu sentral dan mengemuka pasca kepemimpinan Orde Baru.

Belajar dari kesalahan rezim sebelumnya, pemerintah transisi menerbitkan UU No. 22/2001 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32/2004. Kebijakan ini diharapkan dapat meredam konflik dan mensejahterakan rakyat di daerah, tetapi kenyataannya jauh dari harapan.

Otonomi Daerah malah menjadi “pintu masuk” kebangkitan politik identitas etnik di arena ekonomi politik lokal. Di arena ekonomi politik lokal, terbentuk konfigurasi etnopolitik yang memiliki dinamika tertentu dan berpeluang untuk dimasuki politik uang. Bahkan persaingan antar aktor lokal dalam memperebutkan kekuasaan membuka wacana “anti pendatang”, mengejalanya isu “putra daerah”, dan konflik bernuansa etnik. Bahkan ditemukan gejala pemekaran wilayah berdasarkan kesatuan etnisitas (Nordholt dan Klinken, 2007; Klinken, 2007; Tirtosudarmo, 2006; Maunati, 2004; Tadjoeuddin 2002).

Beranjak dari uraian di atas, analisis memperlakukan kondisi obyektif masyarakat majemuk di Indonesia<sup>3</sup> mengandung berbagai kelemahan, sehingga diperlukan suatu analisis baru yang mempertimbangkan perspektif agen-struktur dan memperhitungkan pentingnya struktur dan peran agen di arena ekonomi politik lokal. Dalam konteks tersebut, pemahaman pembentukan identitas etnik sebagai basis politik identitas menjadi penting untuk ditelusuri, sehingga memberikan gambaran bagaimana memperlakukan kemajemukan di Indonesia.

### **Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pembentukan identitas etnik di arena ekonomi politik lokal? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penting mengetahui: (1) diskursus teoritik dan posisi penulis; (2) kondisi obyektif lokasi studi; dan (3) posisi aktor dan mobilisasi [identitas] etnik. Dengan mengetahui ketiga hal tersebut, maka diperoleh informasi tentang pembentukan identitas etnik. Studi ini berguna untuk memberikan rekomendasi memperlakukan kemajemukan masyarakat di Kendari (Sultra) khususnya, dan Indonesia pada umumnya.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif berparadigma nonpositivistik. Sifat penelitian adalah subyektivisme, obyektivisme, dan historis yang dijadikan sebagai panduan menentukan responden. Agar terhindar dari “jebakan” subyektivisme *versus* obyektivisme, peneliti menggunakan perspektif strukturalisme-konstruktivisme. Strukturalis dimaksudkan bahwa sosiologi berusaha mencari proses pola relasi yang bekerja dibelakang aktor, sedangkan konstruktivisme berarti sosiologi menyelidiki persepsi *common sense* dan tindakan aktor. Dengan demikian, membaca aktor harus bolak balik antara struktur obyektif dan subyektif (Mutahir, 2011: 56).

Penggunaan perspektif strukturalisme-konstruktivisme juga ditujukan agar pembacaan realitas sosial oleh peneliti mencerminkan sebuah proses “dialektika internalisasi-eksternalitas dan eksternalisasi-internalitas”. Proses dialektika tersebut adalah upaya memahami struktur obyektif yang ada di luar pelaku sosial (ekterior) dan segala sesuatu yang melekat pada diri pelaku sosial (interior).

Adapun pendekatan pengumpulan data, peneliti menggunakan penelusuran dokumen, studi sejarah, studi kasus, dan riwayat hidup. Pendekatan tersebut, ditujukan kepada aktor dari berbagai latar belakang identitas etnik (Tolaki, Muna, Bugis, dan Buton) dan profesi (politisi, akademisi, swasta, dan NGO/LSM) yang berbeda. Studi ini melibatkan 4 informan dan 28 responden. Baik informan maupun responden ditempatkan sebagai aktor yang dianalisis. Adapun lokasi penelitian dipilih Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan pertimbangan: (1) terdapat kurang lebih 28 etnik; (2) lokasi penelitian memiliki historis masyarakat majemuk berbasis kerajaan tradisional; (3) lokasi penelitian mencerminkan konteks ekologi Indonesia, yakni “daratan” dan “kepulauan”; dan (4) lokasi penelitian menggambarkan terjadinya pergulatan politik identitas etnik.

## **PEMBAHASAN**

### **Diskursus Teoritik dan Posisi Penulis**

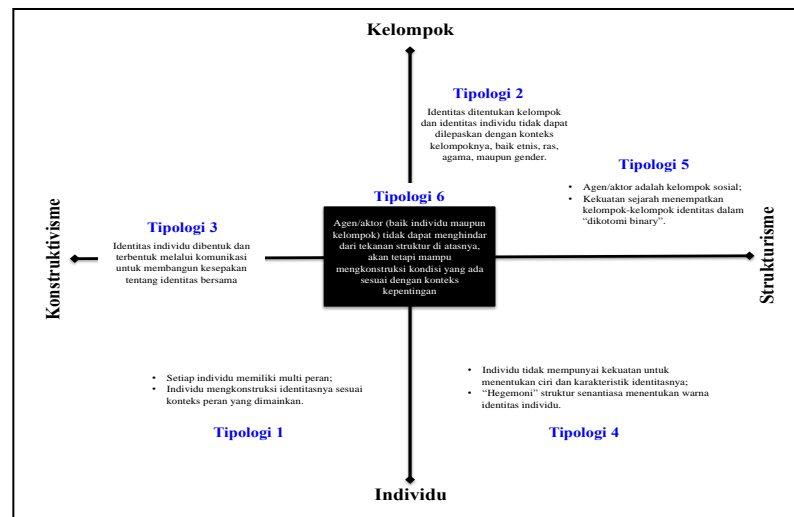
#### **Pembentukan Identitas**

---

federasi pluralis bisa diciptakan, pluralis Asia Tenggara rupanya ditakdirkan akan menghadapi “anarki” yang mengerikan...” (Furnivall 2009: 488-489).

<sup>2</sup> Baca tulisan Hefner (2011), Nordholt dan Klinken (2007), Klinken (2007), dan Maunati (2004).

<sup>3</sup> Data Potensi Desa (2011) menginformasikan bahwa jumlah etnik di Indonesia sebanyak 761 etnik.



Gambar 1. Tipologi Pelaku Politik Identitas (Sjaf 2012).

Teori pembentukan identitas senantiasa menitikberatkan pada pelaku (subyek) dan struktur (obyek), sehingga terdapat dua diskursus teoritik pembentukan identitas etnik. Pertama, kelompok teori-teori strukturasi dan teori-teori agen<sup>4</sup>.

Kelompok teoritik ini, secara garis besar mempunyai titik penekanan yang berbeda. Teori berperspektif strukturasi menitikberatkan pada peran struktur dalam menentukan tindakan aktor dan sebaliknya, teori berperspektif aktor menitikberatkan bahwa tindakan aktor yang tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh struktur yang ada, melainkan aktor adalah individu atau makhluk yang bebas. Kemudian diskursus teoritik kedua, berasal dari teori identitas dan pembentuknya<sup>5</sup>.

Kelompok teori ini, mendasari pada perbedaan level identitas, yakni individu, kelompok, dan komunikatif. Selanjutnya, jika kedua kelompok teori di atas, dianalisis dengan menggunakan pendekatan matriks, maka ditemukan lima tipologi pelaku politik identitas. Kelima tipologi yang dimaksud, yaitu agen-individu, agen-kelompok, struktur-individu, struktur-kelompok, dan agen-struktur-komunikatif. Mencermati kelima tipologi tersebut, maka jelas bahwa aktor tidak dapat didikotomikan antarindividu disatu sisi, dan kelompok pada sisi lain dalam pembentukan identitas. Melainkan, individu dan kelompok adalah aktor yang tindakannya tidak hanya ditentukan struktur dimana aktor tersebut berada. Sebaliknya, aktor dengan leluasa mampu mengkon-struksi identitas yang ada dalam dirinya. Meski demikian, pengalaman dan kesejarahan, serta latar belakang kehidupan sosial tak dapat dikesampingkan karena memberikan pengaruh terhadap tindakan aktor bernuansa identitas. Inilah konteks yang peneliti istilahkan sebagai perspektif agen-struktur (tipologi 6 dalam pelaku politik identitas).

Suatu perspektif yang memberikan gambaran bahwa aktor (baik individu maupun kelompok) tidak dapat menghindari dari tekanan struktur di atasnya, tetapi mampu mengkonstruksi kondisi yang ada sesuai dengan konteks kepentingan (*moment of intentionality*) yang dimiliki aktor tersebut. Tentunya, konstruksi yang dilakukan aktor, sangat ditentukan oleh habitus dan kekuatan modal (*capital*) yang dimiliki aktor untuk menyusun strategi yang jitu untuk mempertahankan kekuasaannya (Gambar 1).

### Arena Ekonomi Politik Lokal

Arena ekonomi politik lokal adalah kondisi obyektif dimana terjadi pertarungan antar aktor untuk memperebutkan sumber-sumber ekonomi dengan kekuasaan (politik) atau sebaliknya di tingkat lokal. Istilah "pertarungan" diambil dari definisi arena yang dirujuk dari pendapat Bourdieu (Boudieu dan Wacquant 1992). Menurutnya arena adalah *field of struggle*, di mana para aktor berjuang meningkatkan posisi objektif mereka. Karena berada di arena pertarungan,<sup>6</sup> para aktor menerapkan berbagai strategi, yaitu "*the active deployment of objectively oriented 'lines of action' that obey regularities and form coherent and socially intelligible patterns*" (Wacquant 1992: 25). Namun, pilihan-pilihan strategi yang tersedia bagi aktor dibatasi kondisi objektif mereka di arena. Di arena, terdapat distribusi modal<sup>7</sup> tertentu dan cara pandang mereka terhadap arena tersebut (Bourdieu dan Wacquant 1992). Hal ini dikarenakan di dalam arena masing-masing memiliki aturan. Adapun aturan yang dimaksud adalah aturan yang berlaku dalam arena ekonomi politik. Agar pemahaman menjadi utuh tentang arena ekonomi politik lokal, maka konsepsi teoritik Granovetter<sup>8</sup> (sosiologi

<sup>4</sup> Baca Barth (1988), Burke dan Stets (1998); Gidens dalam Barker (2006).

<sup>5</sup> Teori ini dikemukakan Rawl, Sandel dan Taylor, dan Habermas (Hardiman 2009).

<sup>6</sup> Di arena pertarungan aktor melakukan (re)produksi *doxa* (wacana dominan), *orthodoxy* (wacana pendukung), dan *heterodoxy* (wacana tandingan).

<sup>7</sup> Menurut Bourdieu, modal yang diperebutkan aktor/agen adalah ekonomi, sosial, simbolik, dan budaya.

<sup>8</sup> Granovetter dikenal sebagai sosiolog pembawa aliran sosiologi ekonomi baru—dalam menganalisis tindakan

	Pemekaran Wilayah	<i>Shadow State</i>	Politik Identitas
Jaringan Sosial	Jaringan pemekaran wilayah	Jaringan <i>shadow state</i>	Jaringan politik identitas
Organisasi Ekonomi	Pengorganisasian ekonomi pemekaran wilayah	Penggorganisasian ekonomi <i>shadow state</i>	Pengorganisasian ekonomi identitas
Kultural	Kultur kekuasaan etnik (basis pemekaran wilayah)	Kultur dalam <i>shadow state</i>	Politik identitas etnik dalam demokrasi/ politik lokal

Gambar 2. Matriks Arena Ekonomi Politik Lokal (Sjaf 2012).

ekonomi baru) dan Nordholt dan Klinken<sup>9</sup> (politik lokal) menjadi diskursus yang menarik. Diskursus diorientasikan untuk menemukan konteks arena ekonomi politik lokal yang di dalamnya terdapat aturan-aturan. Untuk itu, apabila disusun matrik antar area sosiologi ekonomi baru dengan politik lokal, maka terdapat sembilan tipologi arena ekonomi politik lokal (Gambar 2). Kesembilan arena ekonomi politik lokal, sebagai berikut: jaringan pemekaran wilayah, pengorganisasian ekonomi pemekaran wilayah, kultur kekuasaan etnik (basis pemekaran wilayah), jejaring *shadow state*, pengorganisasian ekonomi *shadow state*, kultur dalam *shadow state*, jaringan politik identitas, pengorganisasian ekonomi identitas, dan identitas etnik dalam demokrasi atau politik lokal.

### Kondisi Obyektif Kendari

Hingga penghujung kekuasaan Orde Lama, Kendari bukanlah kota yang dikenal di daratan pulau Sulawesi. Dibandingkan dengan Konawe (Unaaha), Muna, dan Buton yang lebih dikenal karena kedudukannya sebagai pusat kerajaan tradisional di Sultra. Tetapi karena posisinya yang strategis (sebagai kota dagang) sebagai salah satu alasan mengapa Kendari diusung sebagai pusat pemerintahan Sultra. Dibandingkan dengan 12 kabupaten/kota di Provinsi Sultra, Kendari adalah kota tersempit yang memiliki luas 0,78% atau 29.589 hektar. Berbeda dengan Kabupaten Kolaka yang memiliki luas 691.838 hektar (18,14%).

Jumlah penduduk dan kepala keluarga (KK) di Kendari termasuk dalam peringkat 5 besar dari 12 kabupaten di Sultra, yaitu masing-masing sebesar 11,3% (241.072 jiwa) dan 10,8% (56.897 KK). Luas wilayah yang sempit dan jumlah penduduk, serta KK yang tinggi berimplikasi pada kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, yaitu 881 jiwa/km<sup>2</sup> (BPS Prov. Sultra 2010). Tingginya kepadatan penduduk Kendari dianggap wajar karena Kendari sudah

ekonomi aktor. Adapun konsepsinya yang dikenal dengan sebutan “*embeddedness*”.

<sup>9</sup> Nordholt dan Klinken adalah ilmuwan sosial yang menginisiasi dilakukannya beberapa penelitian tentang “Politik Lokal di Indonesia”.

sejak lama dikenal sebagai kota perdagangan yang dihuni berbagai etnik baik lokal maupun pendatang.

Tabel 1. Peristiwa Penting sebagai “Tonggak-tonggak” Dominasi Etnik di Kendari

Peristiwa	Refleksi Periodisasi
1. Keberadaan kerajaan tradisional di Sultra	Pra Kolonialisme
2. Masyarakat yang tersegregasi berdasarkan etnik	Kolonialisme
3. Pembentukan daerah administratif yang sarat dengan identitas etnik	Kemerdekaan
4. Kontrol atas kekuatan [identitas] etnik	Orde Baru
5. Pergulatan politik identitas etnik	Pasca Orde Baru (Reformasi)

Sumber: Sjaf, 2012 (Diolah dari berbagai sumber).

Kekuatan perdagangan yang menjadi andalan kota ini tidak terjadi begitu saja. Melainkan warisan kesejarahan yang sudah ada sejak lama. Penelusuran referensi menunjukkan Kendari yang menjadi ibukota Provinsi Sultra adalah kota perdagangan yang mengekspor hasil-hasil bumi Laiwoi<sup>10</sup> berupa beras. Chalik dan Bhurhanuddin (1984) menyebutkan roda perdagangan Kendari saat itu dijalankan kelompok etnik Bugis yang bertindak sebagai pedagang bermodal yang dibantu kelompok etnik lainnya, seperti: etnik Tolaki (produsen

<sup>10</sup> Menurut beberapa referensi menyebutkan Laiwoi adalah salah satu kerajaan (pecahan Kerajaan Konawe) dari daratan Sultra yang kekuasaannya mencakup Kendari dan beberapa daerah sekitarnya. Dalam batasan kelompok etnik, Kerajaan Laiwoi merupakan kelompok etnik Tolaki (Konawe) yang pusat kerajaannya pertama kali di Ranomeeto. Kemudian catatan Chalik dan Bhurhanuddin (1984) menyebutkan bahwa pada tahun 1927 Raja Laiwoi yang bernama Sao-Sao memindahkan ibukota swapraja dari Lepo-Lepo ke Kendari.

hasil bumi), Muna, dan Buton (buruh atau tenaga kasar di perdagangan). Inilah awal terbentuknya struktur masyarakat (kondisi obyektif) di Kendari yang terdiri dari empat kelompok etnik mayoritas, yaitu Tolaki, Muna, Buton, dan Bugis.

Keberadaan entitas sosial tersebut, memberikan warna kesejarahan Kendari yang tak dapat dipisahkan dari dominasi etnik. Konstruksi etnik “lokal-pendatang” adalah rangkaian upaya mempertegas “kebenaran” wacana dominan (*doxa*) “putra daerah”, yang sesungguhnya tidak lahir begitu saja. Melainkan melekat dengan histori Kendari sebagai kota perdagangan yang terbuka, dimana kelompok-kelompok etnik yang ada didalamnya saling berinteraksi tanpa menanggalkan keidentitasan etniknya. Kondisi ini dapat dilihat di beberapa peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, seperti: prakolonial, kolonialisme, pra kemerdekaan, kemerdekaan (orde lama), orde baru, dan pasca orde baru (reformasi). Rangkaian peristiwa tersebut, dapat disebut “tonggak-tonggak” dominasi etnik di Kendari (Tabel 1).

Hingga kini terdapat kurang lebih 28 etnik yang menyebar di Sultra dan dari 28 etnik tersebut, terdapat 4 etnik mayoritas yang berdiam di Kendari, yaitu: Tolaki, Muna, Buton, dan Bugis. Etnik Tolaki merupakan kelompok yang memiliki persentasi tertinggi mendominasi kelurahan di Kendari, yakni 42,19% (27 kelurahan). Hampir diseluruh kelurahan/kecamatan, kelompok etnik ini mendominasi, kecuali di Kecamatan Kendari. Adapun persentasi angka tertinggi, ditemukan di Kecamatan Abeli sebanyak 7,81% (5 kelurahan), Kecamatan Kadia sebanyak 6,25% (4 kelurahan), Kecamatan Kambu 4,69% (3 kelurahan), Kecamatan Puwatu dan Wua-Wua masing-masing sebanyak 6,25% (4 kelurahan) dan 4,69% (3 kelurahan).

Etnik Muna merupakan kelompok etnik terbanyak kedua setelah etnik Tolaki yang mendiami kelurahan di Kendari (28,13% atau 18 kelurahan). Persentasi tertinggi kelompok etnik Muna ditemukan di Kecamatan Kendari sebanyak 7,81% (5 kelurahan) dan Kecamatan Poasia sebanyak 4,7% (3 kelurahan). Sedangkan etnik Bugis adalah kelompok etnik yang menempati urutan ketiga dengan persentasi sebanyak 26,56% (17 kelurahan) dan ditemukan di empat kelurahan, yaitu Abeli, Kambu, Kendari, dan Kendari Barat. Terakhir kelompok etnik Buton merupakan entitas sosial yang menempati urutan keempat dengan persentasi hanya 1,56%. Di Kendari, kelompok etnik ini banyak dijumpai di kelurahan Kendari Barat. Untuk proporsi persentasi yang seimbang antar kelompok etnik (Muna, Tolaki, dan Bugis) ditemukan di Kecamatan Mandonga, yaitu masing-masing 3,13% atau 2 kelurahan (Gambar 3).

Keberadaan empat etnik mayoritas di atas, kemudian mempengaruhi praktik ekonomi politik lokal. Di arena

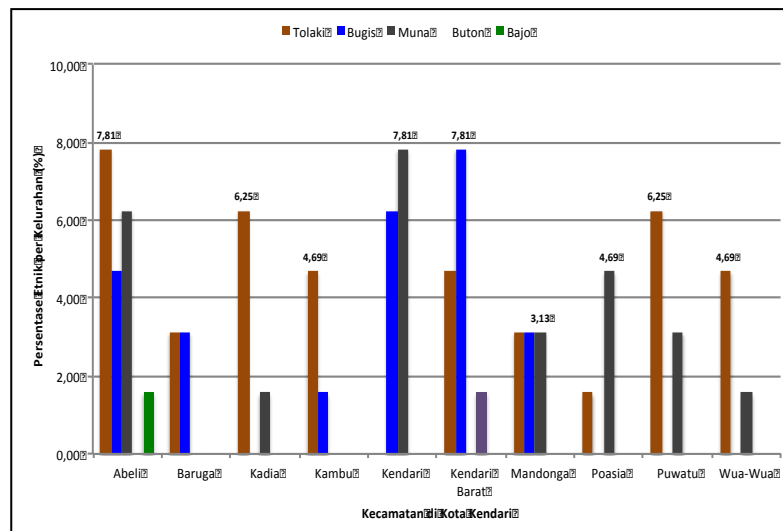
politik lokal, identitas etnik dijadikan sebagai basis pasangan kandidat pemilihan walikota (pilwali) maupun pemilihan gubernur (pilgub). Sedangkan di arena ekonomi lokal, dominasi ekonomi senantiasa melekat dengan identitas etnik atau disebut “ekonomi identitas” (Tabel 2).

Tabel 2. Ekonomi Identitas di Kendari

	Ekonomi Identitas	Etnik
Perdagangan	• Distributor, hotel, dan properti	• Bugis, Buton, [Cina]
	• Eceran dan hasil bumi	• Bugis, Buton
	• Restoran	• Bugis, [Cina], [Jawa], dan Muna (minoritas)
Produksi dan Jasa	• Pertanian, Peternakan	
	• Jasa tenaga kerja, meliputi: birokrasi, buruh, transportasi, dll	• Muna, Tolaki
Berkembang	• Pertambangan dan Penggalian	• Disesuaikan dengan basis etnik penguasa
	• Industri Pengolahan	
Terbelakang	• Kontraktor	

Sumber: Sjaf (2012) dikombinasikan dengan hasil penelitian Anam, S. *et al.* (2011).

Tabel 2 menunjukkan ekonomi perdagangan (eceran dan distributor), hotel dan properti didominasi etnik Bugis dan Buton. Kondisi ini berbeda dengan struktur ekonomi potensial, yang didominasi etnik Tolaki dan Muna (pertanian, perkebunan, peternakan, dan jasa) dan etnik Bugis untuk perikanan. Adapun dominasi struktur ekonomi berkembang (pertambangan dan penggalian) dan sektor ekonomi terbelakang (konstruksi) disesuaikan basis etnisitas penguasa. Hal tersebut dikarenakan kedua struktur ekonomi ini terkait dengan kebijakan investasi dan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mana kontrol penguasa dan jejaringnya sangat dominan.



Gambar 3. Sebaran Kelompok Etnik per Kecamatan

### Posisi Aktor dan Mobilisasi [Identitas] Etnik

Aktor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah elit.<sup>11</sup> Di arena ekonomi politik lokal, aktor lebih mendominasi dibandingkan massa (terdominasi) dengan me(re)produksi identitas etnik untuk kepentingan ekonomi dan politik. Mendominasinya golongan elit dan terdominasinya golongan massa tersebut, disebabkan arena ekonomi politik lokal merupakan tempat terdapatnya hierarki ganda yang berada pada posisi “dikotomis” antar golongan elit dengan golongan massa. Adapun hierarki yang dimaksud, sebagai berikut: (a) *prinsip hierarki heteronom*, adalah ukuran kesuksesan aktor dinilai berdasarkan jumlah jabatan (kekuasaan) yang dimiliki dan kekayaan yang dipunyai.

Penghargaan pada diri seseorang (aktor), linear dengan kekuasaan (jabatan) dan kekayaan yang *embedded* dalam diri aktor. Untuk itu, prinsip ini lebih menekankan pada kepemilikan modal ekonomi aktor ketimbang jenis modal lainnya; dan (b) *prinsip hierarki otonom*, adalah derajat pengakuan terhadap masing-masing eksistensi etnisitas massa. Sejarah etnik dan kedudukan etnik di Kendari merupakan *symbolic power* yang tidak dapat ganggu gugat. Menggugat *symbolic power* berarti sama halnya membangkitkan “sentimen etnik” massa. Hal ini dikarenakan massa memiliki kepercayaan penuh terhadap *symbolic power* yang diwarisi secara turun-temurun oleh generasi sebelumnya. Selanjutnya, prinsip ini lebih menekankan pada modal simbolik. Meski demikian, prinsip hierarki otonom menjadi longgar manakala massa diperhadapkan pada situasi yang sulit, seperti hidup dalam garis kemiskinan dan kurangnya perhatian dari komunitas etniknya.

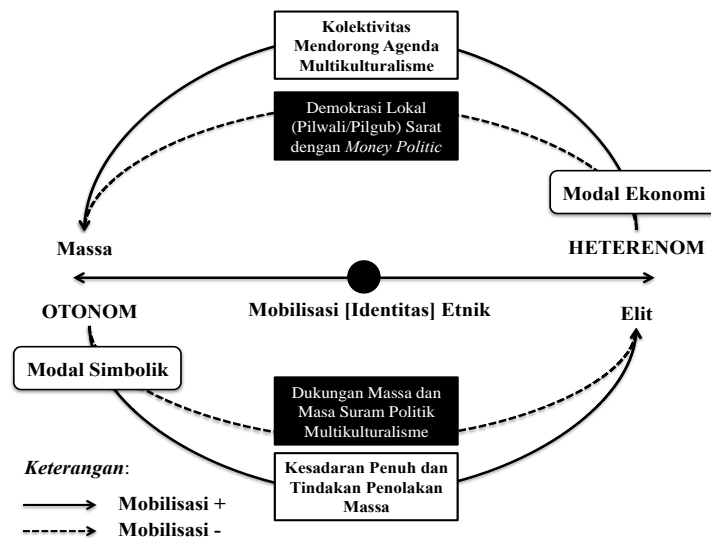
Berdasarkan uraian tersebut, penulis menganggap bahwa posisi aktor di arena ekonomi politik lokal mampu mendorong terwujudnya mobilisasi [identitas] etnik yang bersifat negatif maupun positif. *Mobilisasi [identitas]*

*etnik bersifat negatif*, terjadi apabila aktor dengan modal ekonomi yang dimilikinya melakukan upaya mobilisasi identitas etnik. Mobilisasi ini bertujuan memperoleh dukungan simbolik kelompok etnik untuk meraih kekuasaan politik sebagaimana yang diharapkan aktor. Situasi dan kondisi ini terjadi, apabila massa yang tersegregasi berdasarkan kelompok-kelompok etnik berada pada kondisi garis kemiskinan sebagai kondisi obyektif. Arena politik lokal (pilkada) yang mencerminkan penerapan demokrasi lokal bernuansa liberal dengan mudah membuka ruang mobilisasi [identitas] etnik. Adapun implikasi yang dihadirkan apabila hal ini terus “dipelihara” dan berlanjut adalah suramnya masa depan agenda multikulturalisme di Kendari, Sultra maupun Indonesia.

Sementara itu, *mobilisasi [identitas] etnik bersifat positif*, terjadi apabila aktor dengan kekuatan yang dimilikinya mendukung (menjaga) sepenuhnya modal simbolik yang telah melekat dalam diri massa. Atau terjadi apabila massa yang memiliki modal simbolik dengan kesadaran penuh melakukan tindakan penolakan atas segala cara yang dilakukan untuk membenturkan antar massa (kelompok-kelompok etnik) demi kepentingan kekuasaan aktor. Perihal yang terakhir, memungkinkan apabila kondisi massa sudah berhasil keluar dari garis kemiskinan dan adanya kemauan kolektif dari seluruh pihak untuk mengawal agenda multikulturalisme.

### Pembentukan Identitas Etnik di Arena Ekonomi Politik Lokal

<sup>11</sup> Penggolongan struktur masyarakat di Kendari dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu (1) golongan massa (masyarakat luas termasuk kelompok-kelompok etnik); dan (2) golongan elit (individu baik elit politik, akademisi, dan sebagainya).

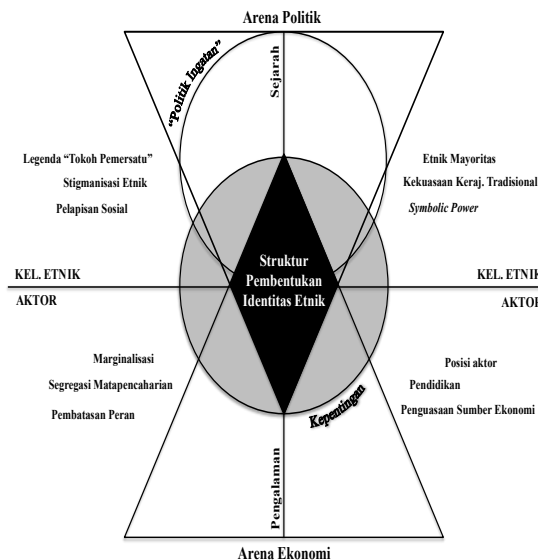


Gambar 4. Mobilisasi [Identitas] Etnik dalam Arena Ekonomi Politik Lokal (Sjaf 2012).

Identitas aktor dilihat dari habitusnya yang tercermin dari hasil praktek (*opus operatum*) dan modus praktek (*modus operandi*). *Opus operatum* terkait pengalaman (disposisi) aktor memaknai realitas yang dihadapi, sehingga membentuk identitas etnik atau habitus yang merupakan kedirian dari aktor tersebut. Sedangkan *modus operandi* terkait dimensi sejarah (posisi) kelompok etnik yang menstruktur dan sudah terbangun sejak lama. Modus praktik aktor merupakan upaya melanggengkan wacana dominan kekuasaan simbolik (*doxa of symbolic power*) yang berdampak terhadap semakin kokohnya legitimasi dan kekuasaan aktor. Berbeda dengan temuan Tod (2005) tentang

yang berada pada garis kontinum sejarah (posisi aktor di dalam kelompok etnik) dan pengalaman (disposisi aktor) yang saling berinteraksi (pertemuan). Interaksi ini dipengaruhi “politik ingatan” kelompok etnik dan kepentingan ekonomi aktor (Gambar 5).

Pada garis kontinum sejarah, kelompok etnik memainkan peran membangun “politik ingatan” tentang legenda “tokoh pemersatu”, stigmatisasi etnik, pelapisan sosial, etnik mayoritas, kekuasaan kerajaan tradisional, dan kekuasaan simbolik. Dengan kata lain, konteks ini memberikan gambaran tentang posisi aktor di dalam kelompok etniknya. Agar posisi ini bertahan, maka aktor bersama-sama kelompok etnik melanggengkan *doxa* dan



Gambar 5. Struktur Pembentukan Identitas Etnik di Arena Ekonomi Politik Lokal (Sjaf 2012).

pembentukan identitas etnik (aktor maupun kelompok etnik), penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan identitas baik bersifat individu maupun kolektif, berada pada ruang yang disebut struktur pembentukan identitas etnik. Struktur ini menekankan bahwa identitas etnik yang terbentuk baik ditingkatkan aktor maupun kelompok etnik merupakan habitus aktor maupun kelompok etnik

terus melakukan *orthodoxy* yang dimilikinya. Atau melakukan *heterodoxy* atas *doxa* yang bersifat negatif bagi aktor dan kelompok etnik mereka. Studi ini menunjukkan bahwa salah satu *doxa* yang dipertahankan adalah kekuasaan kerajaan tradisional masa lalu dan kedudukan kelompok etnik (simbol kekuasaan dan legenda “tokoh pemersatu”). Selanjutnya *doxa*,



*orthodoxy*, dan *heterodoxy* tersebut di(re)produksi dari satu generasi ke generasi lainnya. Dengan demikian, dimensi sejarah memberikan ruang bagi aktor dan kelompok etnik untuk mempertahankan posisi melalui peles-tarian modal simbolik dan modal budaya.

Kemudian pada garis kontinum pengalaman, aktor memainkan peran atas dasar kepentingan ekonomi dengan melakukan disposisi. Disposisi-disposisi, seperti kondisi marginalisasi, segregasi matapencaharian, pembatasan peran, dan penguasaan sumber-sumber ekonomi yang dialami dan dirasakan aktor menyebabkan aktor berupaya mem(re)produksi sentimen kelompok etnik agar aktor keluar dari kondisi posisi sebelumnya. Aktor yang terdominasi dalam ekonomi, akan berupaya sekeras mungkin memperoleh modal ekonomi dengan mem(re)produksi modal sosial (jaringan aktor) dan modal simbolik yang dimilikinya, sehingga mampu mengakses sumber ekonomi. Ketika sumber ekonomi tersebut berhasil diakses, maka aktor berharap memperoleh posisi strategis dan berada pada posisi yang tidak terdominasi lagi. Sedangkan aktor yang mendominasi akan terus melakukan upaya melanggengkan posisinya dengan melakukan pengakumulasian modal ekonomi, memperluas modal sosial, dan menjaga modal simbolik yang telah dimilikinya.

Oleh karena itu, struktur pembentukan identitas etnik dalam arena ekonomi politik merupakan relasi dialektikal antara aktor dengan kelompok etnik sehingga membentuk identitas bersama dan melekat dalam diri aktor, yang dilandasi atas kesejarahan kelompok etnik (posisi aktor) dan pengalaman (disposisi) dari aktor sendiri. Meski demikian, identitas etnik aktor dapat berubah seiring berjalannya waktu, manakala terjadi disposisi baru dalam diri aktor. Sebagai misal, apabila kepentingan aktor untuk memperbesar atau memperluas kekuasaan di arena ekonomi politik semakin kecil, maka aktor berusaha melakukan redefinisi keidentitasan etnik untuk mempengaruhi kelompok etnik agar memenangkan pertarungan yang dilakukannya di arena ekonomi politik.

Jika disederhanakan, maka struktur pembentukan identitas etnik terdiri dari dua bagian: *pertama*, pembentukan identitas etnik skala besar, yaitu pembentukan identitas etnik yang mempertemukan sejarah kelompok etnik (posisi) dengan pengalaman aktor (disposisi). Pembentukan identitas etnik skala besar terjadi di dalam (inter) dan antaretnik. Di internal kelompok etnik, aktor bersama kelompok etniknya me(re)produksi berbagai jenis modal (ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik) yang dimilikinya. Sedangkan diantar etnik yang berbeda, masing-masing aktor dan kelompok etnik me(re)produksi modal simbolik untuk membangun afiliasi etnik. *Doxa* “daratan *versus* kepulauan” dalam praktik politik lokal di Kendari (Sultra) adalah salah satu contoh dari pembentukan identitas ini (lihat Gambar6). Umumnya, pembentukan identitas etnik ini dimanfaatkan untuk memenangkan pertarungan arena politik, lalu masuk ke arena ekonomi.

Ekologi Etnik	Daratan
---------------	---------

	Tolaki	Bugis
	Muna-Tolaki	
Kepulauan	Buton	Buton-Bugis

Gambar 6. Afiliasi Kelompok Etnik pada Praktik Politik Lokal.

*Kedua*, pembentukan identitas etnik terbatas, yaitu pembentukan identitas etnik berdasarkan pengalaman atau disposisi-disposisi yang terjadi di dalam diri aktor. Sebelum aktor memanfaatkan sentimen dan jaringan berbasis etnik (modal simbolik) dan jaringan aktor (modal sosial), aktor terlebih dahulu mengakumulasi modal ekonomi sesuai dengan kepentingannya. Berbeda dengan struktur pembentukan identitas sebelumnya, aktor berupaya terlebih dahulu memenangkan pertarungan di arena ekonomi, kemudian masuk ke arena politik. Ini dapat dilihat dari fenomena pengorganisasian ekonomi identitas *danshadow state*.

## SIMPULAN

Pembentukan identitas etnik di arena ekonomi politik lokal terjadi di ruang struktur pembentukan identitas etnik. Ruang dimana terbentuknya relasi dialektikal antara aktor dengan kelompok etnik sehingga membentuk identitas bersama dan melekat dalam diri aktor yang dilandasi atas kesejarahan kelompok etnik (posisi aktor) dan pengalaman (disposisi) dari aktor sendiri. Adapun struktur pembentukan identitas etnik terdiri dari: (1) pembentukan identitas etnik skala-besar; dan (2) pembentukan identitas etnik terbatas. Selanjutnya kedua struktur ini mengarahkan tindakan aktor dalam praktik-praktik yang terjadi di arena ekonomi politik lokal. Ini dapat dilihat dari praktik politik lokal (pilkada) dan ekonomi identitas. Adapun praktik-praktik tersebut dipengaruhi *prinsip hierarki heteronom* dan *otonom* yang membentuk mobilisasi [identitas] etnik bersifat positif maupun negatif. Kecenderungan menguatnya mobilisasi [identitas] etnik di arena ekonomi politik lokal yang bersifat negatif, berakibat kegagalan me(re)produksi tokoh nasional (kepemimpinan nasional) maupun pengusaha nasional yang berasal dari daerah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Syamsul, *et al.* 2011. Profil Pengembangan Kota Kendari. Kendari: Bappeda Kota Kendari Bekerjasama dengan Pusat Studi Otonomi Daerah Unhalu.
- Chalik, HA dan Bhuhanuddin, B. 1984. Sejarah Sosial Sulawesi Tenggara. Kendari: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional 1983/1984.
- Barth, Fredrik. 1988. Kelompok Etnik dan Batasannya. Jakarta: UI Press.
- Barker, C. 2006. *Cultural Studies*: Teori dan Praktek. Yogyakarta: Kreasi Wacana.



- Bourdieu, Pierre and Loic J. D. Wacquant. 1992. *An Invitation to Reflexive Sociology*. Chicago: The University of Chicago Press.
- BPS Prov. Sultra. 2010. Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2010. Sulawesi Tenggara: PT. Primatama Kendari.
- Furnivall, J.S. 2009. Hindia Belanda: Studi tentang Ekonomi Majemuk. Jakarta: Freedom Institute.
- Hardiman, F. Budi. 2009. Demokrasi Deliberatif. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hefner, RW [editor]. Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Maunati, Yekti. 2004. Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan. Yogyakarta: LKIS.
- Mutahir, A. 2011. Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu: Sebuah Gerakan untuk Melawan Dominasi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Nordholt, HS, *et al.* [editor]. 2007. Politik Lokal di Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Swedberg, R. 1998. *Max Weber and the Idea of Economic Sociology*. New Jersey, USA: Princeton University Press.
- Tadjoeddin, MZ. 2002. Anatomi Kekerasan Sosial dalam Konteks Transisi: Kasus Indonesia 1990-2001. Jakarta: *United Nations Support Facility for Indonesian Recovery* (UNSFIR).
- Tirtosudarmo, R, *et al.* 2006. Desentralisasi dan Good Governance di Sulawesi Tenggara: Peran Akademi dan Intelektual dalam Proses Pemekaran Wilayah. Jakarta: LIPI.
- Todd, Jennifer. 2005. "Social Transformation, Collective Categories, and Identity Change". *Theory and Society*, Vol. 34, No. 4, 429–463.